

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang berarti mekanisme teknis analisis dan analisis akuntansi yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2015). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Sektor publik memiliki tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba melainkan memberi pelayanan publik (*public service*), misalnya: pendidikan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik. Selain memberikan pelayanan publik, organisasi sektor publik juga memiliki tujuan lain yaitu tujuan finansial. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Sedangkan menurut Halim (2014) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

2.1.2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2015).

Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya karena pemerintah daerah lah yang dianggap paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis

perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal adalah suatu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam bidang tertentu dan diperuntukkan untuk pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakatnya.

2.1.3. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013, Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Halim (2014) “pengertian belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya”.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah:

1. **Belanja Modal Tanah**
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk memperoleh manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.4. Investasi Swasta

Menurut Samuelson (2011) investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang

inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Contoh dari investasi swasta adalah kontribusi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, peran pihak swasta adalah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan melakukan investasi. Dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 5.519 triliun, dukungan dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharap mencapai Rp 2.216 triliun atau 40,1%, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 545 triliun atau 9,9%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 1.066 triliun atau 19,3%, serta sektor swasta mencapai Rp 1.692 triliun atau 30,7% (Layanan Informasi BPIW, 2016)

Menurut UU No.25 tahun 2007 Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya penambahan pendapatan. Jika

pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (2014) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

- 1) Investasi portofolio (*Portfolio Investment*)
Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
- 2) Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*)
Merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi swasta adalah investasi yang memiliki sumber modalnya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dan merupakan investasi bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,

Kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) (BPS, 2021). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100 yang berarti semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penyempurnaan IPM dengan metodologi baru pada tahun 2014 dengan perubahan pada indikator dan metode perhitungan yang digunakan. IPM yang awalnya menggunakan Angka Melek Huruf sebagai indikator untuk kesejahteraan di bidang pendidikan, kini berubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah. Begitu juga dengan PDB per kapita sebagai indikator standar hidup yang layak diganti dengan PNB per kapita. Dalam metode perhitungan, IPM dengan metode lama yang menggunakan metode agregasi, kini diubah menjadi metode rata-rata geometrik. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas Pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Begitu juga dengan PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM saat ini menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Dimensi dan rumus yang digunakan dalam perhitungan IPM sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

Pada metode baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia untuk dimensi kesehatan terdapat variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Adapun dimensi Kesehatan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

2. Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan terdapat dua variabel yang mempengaruhi perhitungan Indeks Pendidikan yaitu, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indeks HLS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

Salah satu variabel yang lainnya yaitu, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$$

Dua variabel yang terdapat pada dimensi pendidikan tersebut maka Indeks pendidikan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* atau PPP). Rata-rata

pengeluaran per kapita setahun dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Dimensi Pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Indeks pendidikan, kesehatan dan pengeluaran tersebut, maka dapat dihitung rata-rata geometriknya untuk menghitung nilai IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat daerah dalam mengakses pengetahuan (Pendidikan), memiliki umur panjang dan sehat (Kesehatan) serta memiliki standar hidup yang layak. Adapun untuk melihat capaian IPM dapat melalui pengelompokkan IPM pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Peringkat Kinerja IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
Angka	Kategori
< 60	Rendah
60 < IPM < 70	Sedang
70 < IPM < 80	Tinggi
IPM > 80	Sangat Tinggi

Sumber : ipm.bps.go.id

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang

sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, I Made Aditya Pramatha & A.A.N.B. Dwirandra (2018)	X1 : Desentralisasi Fiskal X2 : Belanja Modal X3 : Investasi Swasta Y : Indeks Pembangunan Manusia	Uji Regresi Linear Berganda	X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y X3 tidak berpengaruh terhadap Y
2	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, Denni Sulistio Mirza (2012)	X1 : Kemiskinan X2 : Pertumbuhan Ekonomi X3 : Belanja Modal Y : Indeks Pembangunan Manusia	Metode Regresi Data Panel	X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y X2 dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Periode 2013-2015, Dr. Tina Miniawati Barusman,S.E., M.B.A & Tia Rizna	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Belanja Modal Y : Indeks Pembangunan Manusia	Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, dan Uji Autokorelasi	Uji Hipotesis menunjukkan X1 dan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y

	Pratiwi, S.E., M.S.Ak. (2016)			
4	Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Alokasi Belanja Modal, Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Rizky Hartawan Natanael Purba (2016)	X1 : Derajat Desentralisasi Fiskal X2 : Alokasi Belanja Modal X3 : Ketergantungan Keuangan Daerah Y : Indeks Pembangunan Manusia	Analisis statistik yaitu pengujian asumsi klasik yang dilanjutkan dengan analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan uji residual.	Secara stimultan X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Secara parsial X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y sedangkan X2 dan X3 berpengaruh negatif
5	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2017), Moch. Rudy Setyawan dan Sjamsul Arief (2016)	X1 : Desentralisasi Fiskal X2 : Pertumbuhan Ekonomi X3 : Belanja Modal Y : Indeks Pembangunan Manusia	Metode Regresi Data Panel	X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y
6	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan	X1 : Desentralisasi Fiskal X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)	Analisis Jalur	1. X1 dan X3 tidak berpengaruh terhadap Z 2. X2 dan X4 berpengaruh terhadap Z 3. Y tidak memiliki pengaruh terhadap Z

	Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, Muhammad Yafiz Zaufi, Taufeni Taufik Dan Restu Agusti (2016)	X4 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Modal Z : Indeks Pembangunan Manusia		Y dalam memediasi X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh terhadap Z tetapi dalam memediasi X3 dan X4 memiliki pengaruh terhadap Z
7	Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur, Mohamad Miftahur Royan, Aisah Jumiaty, Fajar Wahyu Prianto (2015)	X1 : Investasi Publik X2 : Investasi Swasta Y : Indeks Pembangunan Manusia	Metode Regresi Data Panel	X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y
8	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Indrasuara Luther Sirangi Si'lang, dkk (2019)	X1 : PDRB Sektor Pertanian X2 : Belanja Langsung Pemerintah X3 : Investasi Swasta X4 : Tingkat Pengangguran Terbuka Y : Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y 2. X1, X2, dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y 3. X4 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y. X1 berpengaruh dominan terhadap Y
9	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang	X1 : Pengeluaran Pemerintah	Analisis Regresi Data Panel	X1, X2, dan X3 berpengaruh positif dan

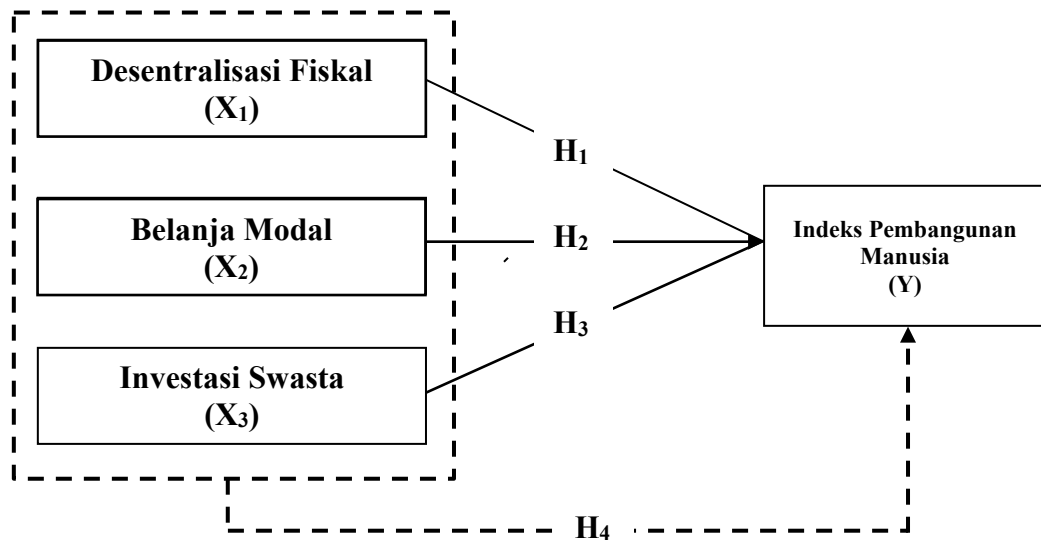
	Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bakorwil V Provinsi Jawa Timur, Julio Dwi Surya Aditya (2019)	Bidang Pendidikan X2 : Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan X3 : Investasi Swasta Y : Indeks Pembangunan Manusia		signifikan terhadap Y
10	Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, Etik Umiyati, Amril, Zulfanetti (2014)	X1 : Belanja Modal X2 : Pertumbuhan Ekonomi X3 : Jumlah Penduduk Miskin Y : Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Data Panel	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y
11	Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara, Winsy A. Tarumingkeng, Vekie A. Rimate, Tri Oldy Rotinsulu (2017)	X1 : Belanja Modal X2 : Tingkat Kemiskinan Y : Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Linear Berganda	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap

pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
- - - - -→ : Pengaruh secara simultan
- H₁ : Hipotesis 1
- H₂ : Hipotesis 2
- H₃ : Hipotesis 3
- H₄ : Hipotesis 4

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah “praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian” (Dantes, 2012) sedangkan menurut Sugiyono (2019), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1. Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah digunakan pemerintah untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang dapat secara langsung mempengaruhi bahkan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia, seperti belanja yang dilaksanakan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

Dengan demikian, semakin baik pemerintah menyelenggarakan desentralisasi fiskal seharusnya terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. H_1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2.4.2. Hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013, Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap komponen pembentuk IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketika Belanja Modal terealisasi dengan tepat maka IPM juga akan meningkat.

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2.4.3. Hubungan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Salvatore (2014), investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh motif pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu investasi publik ataupun swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen IPM juga akan meningkat.

H₃: Investasi Swasta berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2.4.4. Hubungan Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno,

2012). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu penulis menghipotesiskan sebagai berikut :

H₄ : Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.